



Autentik

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI
DENGAN DEWAS DAN DIRUT LPP RRI DAN LPP TVRI, DAN SESJEN
WANTANNAS**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 6 (enam)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 4 September 2024
Waktu	: 10.00 s.d. 13.01 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS)
Acara	: Pembahasan RKA LPP RRI, LPP TVRI, dan Wantannas TA 2025
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI)
Hadir	: A. ANGGOTA DPR RI 18 orang hadir dari 48 orang Anggota dengan rincian:

1. PIMPINAN

1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

**2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN:**

6 orang hadir dari 11 Anggota

1. Ir. Rudianto Tjen
2. Junico BP Siahaan, S.E.
3. Andika Hasan
4. Mayjen TNI. Mar. (Purn) Sturman Panjaitan. S.H.
5. Drs. Mukhlis Basri
6. H. Muhammad Idham Samawi

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN

KARYA:

2 orang hadir dari 7 Anggota

1. Nurul Arifin, M.Si.
2. Tofan Maulana

**4. FRAKSI PARTAI GERAKAN
INDONESIA RAYA:**

0 orang hadir dari 7 Anggota

**5. FRAKSI PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT:**

1 orang hadir dari 4 orang Anggota

1. Hasby Anshory, S.E., M.M.

**6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA:**

4 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
2. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori,
M.P.
3. Dr. Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini
4. H. Andi Najmi Fuadi, S.H.

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang hadir dari 5 orang Anggota

1. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
2. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si.

**8. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA:**

1 orang hadir dari 4 orang Anggota

**9. FRAKSI PARTAI AMANAT
NASIONAL:**

2 orang hadir dari 3 orang Anggota

1. Dr. Ir. H. Ahmad Rizki Sadiq, M.Si.
2. Slamet Aryadi, S.Psi.

**10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

0 orang hadir dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN

1. Sekretaris Jenderal Wantannas (Laksda
TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S.)
2. Direktur Utama LPP TVRI (Iman
Brotoseno)
3. Direktur Utama LPP RRI (Hendrasmo)
4. Dewan Pengawas LPP RRI

5. Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI (Muhamad Sujai)

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi menjelang siang,
Salam sejahtera buat kita semuanya.

**Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr.,
Bapak Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat Sekjen Wantannas, terus
Bapak Agus Sudibyo Ketua Dewan TVRI,
Pak Iman Brotoseno Dirut LPP TVRI,
Pak Hendrasmo Dirut LPP RRI, dan
Pak Anwar Mujahir Adhy Trisnanto Ketua Dewan LPP RRI beserta seluruh jajarannya,**

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Hari ini kita akan mengadakan rapat dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP RRI dan LPP TVRI, dan Sesjen Wantannas. Hari Rabu, 4 September 2024.

Laporan dari Sekretariat rapat ini dihadiri oleh 11 Anggota secara fisik dan dari 5 Fraksi, kita *ngambil* kuorum fraksi, kita setuju ya kuorum fraksi ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucapkan *bismillahirrahmnirrahim* rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Komisi I DPR RI telah menerima surat dari Badan Anggaran DPR RI, yaitu surat Nomor B/6347/AG.05.01/06/2024, tanggal 10 Juni 2024, perihal penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Jadwal pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan surat dari Badan Anggaran tersebut di atas, maka pada hari ini kita mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewas dan Dirut LPP RRI dan LPP TVRI, dan Sesjen Wantannas dalam rangka pembahasan RKA LPP RRI, LPP TVRI, dan Wantannas yang merupakan amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17, tahun dua ribu dua..., tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Pasal 59 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Selanjutnya, kami persilakan kepada yang terhormat, kita mulai dari Sesjen Wantannas dulu untuk menyampaikan paparannya, kemudian nanti disusul oleh Dirut LPP TVRI dan LPP RRI.

Pada Sesjen Wantannas, kami persilakan.

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B. HUTABARAT, M.M.S.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Shalom,
om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang terhormat Ketua Komisi I DPR RI dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi,
Yang kami hormati para Pimpinan dan segenap Anggota Komisi I DPR RI,
Serta hadirin yang berbahagia,
Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,**

Sesuai dengan surat undangan dari DPR RI, maka izinkan kami pada hari ini Sesjen Wantannas beserta Tim, mempresentasikan Rencana Kerja Anggaran atau RKA Tahun 2025.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia, perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 atau Wantannas RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp54.665.836.000,- dengan rincian sebagai berikut.

1. Program kebijakan dan strategi ketahanan nasional sebesar Rp10.044.746.000,-
2. Program dukungan manajemen sebesar Rp44.621.090.000,-

Adapun target *output* yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025, yaitu program kebijakan dan strategi ketahanan nasional sebanyak 23 rekomendasi kebijakan dan program dukungan manajemen sebanyak 15 pelayanan dan satu rancangan peraturan Presiden.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP TA. 2025, Wantannas RI diamanatkan untuk mendukung 2 program Prioritas Nasional atau PN sebagai berikut. Satu, Prioritas Nasional Nomor 1, yaitu memperkuat ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Dewan Keamanan

Nasional. Kedua, Prioritas Nasional Nomor 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dengan kegiatan sebagai berikut.

Pertama, rumusan kebijakan terkait perkiraan strategi nasional, kedua rumusan kebijakan terkait rencana kontijensi, yang ketiga rumusan kebijakan terkait perkiraan risiko pembangunan nasional, dan akhirnya keempat rumusan kebijakan dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dihadapkan dengan kebutuhan anggaran Wantannas RI Tahun Anggaran 2025, jumlah pagu anggaran tersebut masih jauh dari kalkulasi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh Wantannas RI. Walaupun demikian, kami akan berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsi Wantannas RI dengan optimal.

Sesuai dengan prosedur dan mekanisme hubungan kerja atau prospek kerja Wantannas RI, Wantannas RI menyusun apresiasi nasional atau Aptranas yang kemudian oleh Bappenas dijadikan salah satu sumber dalam penyusunan rencana kerja pemerintah. Aptranas tahun berjalan juga digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan prospek kerja di Wantannas RI, di mana Aptranas tersebut senantiasa di-*update* sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Adapun produk-produk Wantannas RI menjadi suatu rekomendasi yang aplikatif kepada Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional RI, maka dalam pembuatannya disusun secara komprehensif integral dengan melibatkan 5 unsur pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, pelaku bisnis, dan media.

Produk rekomendasi Wantannas RI pada pelaksanaannya bisa merupakan *Bottom Up* berdasarkan *Current Issue* dan perkembangan lingkungan strategis atau *top down* berdasarkan rekomendasi yang diperlukan oleh Presiden RI. Di samping itu, produk-produk tersebut dapat menjadi bahan sidang dewan yang dipimpin langsung Presiden RI selaku Ketua Dewan dan 14 Anggota tetap Wantannas RI atau ditambah anggota tidak tetap sesuai dengan keperluan.

Untuk pelaksanaan Sidang Dewan diselenggarakan sebagai berikut. Sidang Dewan membahas tentang kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi, yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap ketahanan nasional negara Republik Indonesia, disertai risiko yang harus diantisipasi dan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Sidang ini dilaksanakan setiap pertengahan tahun dan akhir tahun, yang juga dapat digunakan untuk pedoman dalam melakukan rencana kerja pemerintah pada tahun berikutnya. Kedua, sidang darurat yaitu membahas dinamika lingkungan strategis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi ketahanan nasional dan berpotensi menjadi kondisi kritis,

krisis sehingga perlu langkah-langkah cepat untuk menanggulangi atau meminimalisasi situasi krisis tersebut agar tidak meluas menjadi sebuah ancaman. Sidang darurat dilaksanakan minimal 4 kali dalam setahun atau setiap triwulan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI pada tanggal 13 Juni 2024, usulan tambahan Wantannas RI sebesar Rp26.430.230.000,- tersebut telah disetujui untuk diajukan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan hasil rapat yang dituangkan dalam laporan singkat Komisi I DPR RI. Untuk itu, kami mohon dukungan Komisi I DPR RI untuk dapat merealisasikan tambahan anggaran yang di maksud.

Pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan kembali tentang pentingnya menjaga ketahanan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya dokumen yang memetakan dan menganalisis perubahan dan dinamika lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kondisi Indonesia di masa mendatang. Dokumen tersebut digunakan untuk membantu Presiden dalam mengambil keputusan strategis, membantu pemerintah dalam membuat perencanaan strategis, memberikan gambaran tentang peluang, dan ancaman, serta risiko yang harus diantisipasi, dan mengantisipasi perubahan lingkungan yang berpotensi menjadi kondisi krisis, disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

Dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang diambil berdasarkan analisis yang komprehensif, integral, dan *up to date* sehingga dapat diperlukan bagi negara, sehingga sangat diperlukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, perlu adanya dokumen penilaian ancaman nasional berupa laporan resmi yang disusun oleh pemerintah untuk mengidentifikasi, analisis, dan mengevaluasi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dokumen ini sangat penting karena membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami ancaman yang dihadapi. Merumuskan kebijakan yang tepat dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Dokumen ini lazim digunakan untuk membentuk dasar kebijakan dan strategi keamanan nasional, seperti yang dilakukan oleh *National Security Strategy* atau NSS di Amerika Serikat, *United Kingdom National Security Risk Assessment* atau NSRA di Inggris, dan *Australia National Security Statement di Australia*.

Seiring dengan proses revitalisasi Wantannas RI menjadi Wankamnas RI, maka Wantannas RI akan menginisiasi pembuatan dokumen strategi keamanan nasional tersebut. Adapun kegiatan Sidang Dewan yang dipimpin oleh Presiden RI yang dihadiri oleh 14 Anggota Dewan tetap, serta anggota tidak tetap sesuai kebutuhan akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun, serta 4 kali sidang darurat dalam setahun atau setiap triwulan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 293 Tahun 2024, Wantannas RI mendapatkan tambahan pegawai PNS baru pada tahun 2025 sebanyak 64 orang. Dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp7.243.635.000,- yang terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai PNS baru dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp5.672.835.000,- dan dukungan sarana prasarana penunjang pegawai negeri sipil baru dengan rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp1.570.800.000,- untuk kekurangan anggaran tersebut belum terwadahkan pada pagu anggaran Wantannas RI Tahun Anggaran 2025. Dan sebagaimana yang terjadi belakangan ini perlu dilakukan upaya untuk mengantisipasi adanya kebijakan pemerintah terkait *Automatic Adjustment* pada pagu anggaran di setiap Kementerian dan Lembaga, dan dalam hal ini khususnya Wantannas RI dengan rata-rata terblokir anggaran sebesar 15% dari pagu di setiap tahun di luar belanja pegawai. Besar harapan kami untuk kekurangan anggaran tersebut dapat dipenuhi sehingga rencana kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah disusun dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan singkat kami tentang Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA Wantannas RI Tahun Anggaran 2025.

Sekian dan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi I DPR RI.

*WAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om shanti shanti om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Terima kasih, Pak Sesjen Wantannas.

Dilanjut dengan Dirut LPP TVRI, silakan Pak Iman.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Baik.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,*

Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi I beserta Anggota, kemudian juga Dewan Pengawas LPP TVRI, kemudian direksi Dewan Pengawas LPP RRI, Direksi LPP RRI, serta Sesjen Wantannas,

Izinkan saya untuk memaparkan Rencana Kerja Anggaran LPP TVRI Tahun Anggaran 2025. LPP TVRI dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2025 menjadi bagian dari transformasi Indonesia terutama untuk transformasi digital, jadi ini sudah disepakati dalam Bappenas. Dan pagu indikatif LPP TVRI Tahun 2025 berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI No. S612/MK02 Tahun 2024 dan B480D8/PP040304 2024, tanggal 19 Juli 2024, pagu anggaran LPP TVRI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.422.223.659.000,- dan mengalami penurunan dari pagu alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar 10,3% yang berasal dari belanja non operasional dan PNBPN. Kalau kita lihat dalam pagu anggaran Tahun 2024 total adalah Rp1.573.228.177.000,- yang artinya turun sekitar 10,3% dengan total Rp151.-024.518.000,-.

Pagu indikatif LPP TVRI Tahun 2025 kalau kita beda per program untuk kantor pusat sebesar Rp780.670.883.000,- sementara untuk stasiun penyiaran daerah dengan total Rp641.532.776.000,- dan kalau dari pagu Rp1.422.203.659.000,- untuk program dukungan manajemen sebesar 65% sejumlah Rp932.019.189.000,- dan untuk program penyiaran publik sebesar Rp490.184.470.000,- atau 35%.

Kami juga mengusulkan inisiatif baru LPP TVRI untuk Tahun 2025, ini adalah usulan tambahan anggaran yang tidak terakomodir dalam anggaran, pagu anggaran Tahun 2025 dengan rincian. Pertama, untuk biaya operasional Satker baru 35 miliar. Dua, kebutuhan pembangunan studio tahap pertama di IKN sebesar 77 miliar. Ketiga, kebutuhan pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN serta belanja pegawai sebesar Rp350.098.140.000,-. Keempat, kebutuhan tambahan biaya listrik untuk program dukungan DBS sebesar 12.672.000.000,-. Kemudian kelima, kebutuhan pelaksanaan produksi siaran 140 miliar. Keenam, kebutuhan pengadaan pendukung infrastruktur penyiaran sebesar Rp182.953.230.000,-. Ketujuh, kebutuhan pengadaan prasarana umum sebesar Rp26.200.000.000,-. Dan kedelapan, kebutuhan sosialisasi lembaga penyiaran publik kepada masyarakat sebesar 2 miliar. Dengan total semuanya adalah usulan tambahan Rp825.923.371.000,-.

Jika kita *Breakdown* lagi usulan inisiatif baru LPP TVRI sebesar 35 miliar, yaitu menindaklanjuti rencana strategis renstra Tahun 2020 sampai 2024 untuk meningkatkan jumlah stasiun penyiaran baru di Ibu Kota Provinsi hasil pemekaran, di antaranya TVRI Kepulauan Riau, TVRI Kalimantan Utara, TVRI Banten, TVRI Maluku Utara, dan TVRI di IKN.

Kemudian untuk rencana menindaklanjuti RPJMN 2020-2024 mengenai rencana proyek studio TVRI di IKN sehingga dibutuhkan anggaran untuk bangunan kantor, tower pemancar, studio dan operasional tahap

pertama sebesar Rp77 miliar. Kemudian untuk inisiatif baru kebutuhan pelaksanaan rekrutmen pegawai. Jadi berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor B/1007/MSM01/00/2024 tanggal 13 Maret 2024, Kementerian PANRB telah memberikan persetujuan prinsip untuk penetapan formasi calon ASN Tahun Anggaran 2024 pada Kementerian Kominfo.

TVRI mendapatkan persetujuan 3.606 formasi Pegawai sehingga dibutuhkan anggaran untuk pelaksanaan dasar CPNS, orientasi P3K, dan tambahan belanja dengan total sebesar 350.098.140.000,- Dan ini kalau kita bedah lagi dari jumlah pegawai yang dialokasikan sebesar 3.606, total untuk P3K 1.153 orang dan untuk CPNS sebesar 2.453 orang. Update saat ini sudah 3.575 pelamar CPNS telah mendaftarkan per 27 Agustus 2024 dan sudah memasuki masa seleksi dari mulai 20 Agustus sampai 6 September 2024.

Kemudian tambahan biaya listrik dukungan DBS jadi melalui program *Digitalization Broadcasting System*, maka ada hibah sebesar 199 pemancar digital dari Kominfo untuk mengurangi wilayah *blankspot*. Saat ini belum anggaran untuk biaya instalasi listrik agar pemancar yang dihibahkan dari Kominfo bisa beroperasi. Total biaya listrik itu adalah 12.672.000.000,-. Dan untuk kebutuhan pelaksanaan produksi siaran ada 140 miliar, untuk mengakomodir kekurangan produksi siaran baik berita maupun program, program siaran TVRI Award, dan sewa hak siar olah raga TVRI Sport dengan perincian untuk siaran berita sebesar 25 miliar, siaran program 45 miliar, siaran internasional 30 miliar, dan TVRI Sport 40 miliar.

Kemudian untuk kebutuhan pengadaan tehnik infrastruktur penyiaran diperlukan tetap untuk modernisasi studio penyiaran dan Pusdiklat serta pengadaan 5 pemancar di luar program DBS, pengadaan sistem pusat dan daerah, pengembangan *integrated* media baru dan jurnalisme warga, survei serta media analitik, pengembangan OTT, serta distribusi chanel TVRI Award ke seluruh dunia, serta pengadaan peralatan *digital operating* dengan total Rp182.953.231.000,-

Kemudian untuk kebutuhan pengadaan sarana prasarana umum, TVRI membutuhkan untuk pembangunan data center, rehabilitasi gedung pusat data, pusat produksi siaran dan ini sudah tua ya sehingga diperlukan pemeliharaan dan renovasi secara menyeluruh, serta untuk revitalisasi studio alam yang merupakan potensi untuk pemasukan PNBPN. Total adalah Rp26.200.000.000,-.

Kemudian untuk kebutuhan sosialisasi lembaga penyiaran publik kepada masyarakat sebesar Rp2 miliar. Dan perlu kami sampaikan mengenai kesiapan infrastruktur tehnik untuk Pilkada 2024, jadi dalam ini update, hanya update untuk kesiapan TVRI dalam Pilkada 2024, jadi sebesar, sebanyak 19 News Van dan OB Van telah didistribusikan ke seluruh stasiun penyiaran daerah untuk mendukung program siaran Pilkada Serentak. Jadi TVRI juga sudah memanfaatkan *non-geostationary satellite orbit starlink* sejak Desember 2023 yang dapat digunakan di seluruh penyiaran daerah. Ini beberapa program edukasi politik mengenai Pilkada 2024 dari *Talkshow*, iklan layanan masyarakat, maupun hiburan.

Terakhir kami sampaikan bahwa terkait dengan Pilkada 2024 berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S226/MK2/2024, tanggal 20 Agustus 2024, perihal relaksasi anggaran *Automatic Adjustment* pada lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebesar 57.248.779.000,- sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan untuk digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LPP TVRI dalam Pilkada. Jadi ini termasuk untuk anggaran kantor pusat sebesar 53.230.199.000,- dan pembukaan anggaran di stasiun daerah sebesar Rp4.018.580.000,-. Ini untuk pendukung peralatan teknik produksi dan transmisi dan dukungan teknis Pilkada 2024 serta siaran untuk program Pilkada, termasuk siaran daerah.

Demikian, Pimpinan, yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih.

WAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Waalaiikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Dirut TVRI, sebentar.

Berarti dari pagu indikatif menjadi pagu sementara tidak ada perubahan?

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Tidak ada perubahan, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Hanya pembukaan AA yang perlu kita *Highlight* ya, artinya tidak ada sehingga biar teman-teman *enggak* harus terlalu banyak diskusi nanti. Ya, kenapa? Artinya *enggak, enggak* ada yang berubah *gitu*. Di Wantannas ada yang berubah *enggak* dari pagu indikatif ke pagu sementara, *enggak* ada juga?

**SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B.
HUTABARAT, M.M.S.):**

Tidak, mana yang kami ajukan yang sesuai.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Ajuan tambahan.

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B. HUTABARAT, M.M.S.):

Tambahan itu.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Oke.

Terakhir dari Dirut LPP RRI, silakan.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu.

**Yang kami hormati Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI,
Juga yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI,
juga LPP TVRI, beserta jajaran Direksi RRI maupun TVRI, serta Bapak-
bapak dari Sesjen Wantannas,
Serta hadirin yang berbahagia,**

Siang ini izinkanlah kami dari LPP Radio Republik Indonesia untuk menyampaikan materi RDP sebagaimana telah diagendakan, yakni perihal pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran LPP RRI Tahun Anggaran 2025.

Kami mulai yang pertama, pagu anggaran Tahun Anggaran 2025. Total pagu anggaran LPP RRI adalah Rp1.070.311.831.000,- yang terdiri dari rupiah murni 98,11% dan PNBPN sebesar 1,89% atau senilai Rp20.214.624.000,- Pagu indikatif dan pagu anggaran Tahun Anggaran 2025, baik pagu indikatif maupun pagu anggaran 88,72A% diantaranya dari Rp1.070.311.831.000,- diperuntukan bagi program dukungan manajemen sedangkan 11,27% sisanya diperuntukan bagi program penyiaran publik.

Perbandingan pagu indikatif dan pagu anggaran Tahun Anggaran 2025, baik pada pagu indikatif atau pagu anggaran untuk per programnya memiliki nilai yang sama, yakni dari total pagu peruntukan bagi belanja pegawai memiliki porsi terbesar, yakni sebanyak 52,5% atau sama dengan Rp562.196.498.000,- untuk belanja barang sebesar 27,28% atau senilai Rp292.039.109.000,- sedangkan untuk belanja modal senilai 9,81% atau sama dengan Rp100.076.224.000,-

Rekapitulasi pagu anggaran Tahun Anggaran 2025. Sesuai surat bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor B480/D8/PP0403/07/2024 dan S612/MK02/2024 tentang pagu anggaran LPP RRI Tahun Anggaran 2025. LPP RRI mendapatkan pagu sebesar Rp1.070.311.831.000,- yang terdiri dari belanja pegawai bersumber rupiah murni dengan pagu Rp562.196.498.000,- belanja barang bersumber rupiah murni yakni dengan pagu Rp393.366.431.000,- belanja baran bersumber PNBP dengan pagu Rp20.214.624.000,- serta belanja barang bersumber dana prioritas nasional dengan pagu anggaran Rp19.458.054.000,-

Selanjutnya per jenis belanja modal dengan sumber dana rupiah murni, yakni dengan pagu Rp77.227.084.000,- serta belanja modal dengan sumber dana prioritas nasional dengan pagu Rp27.849.140.000,-

Program prioritas LPP RRI Tahun Anggaran 2025. Total nilai program prioritas nasional LPP RRI Tahun Anggaran 2025 adalah Rp47.307.194.000,- yang dialokasikan untuk pengadaan pemancar beserta pendukung, yakni senilai Rp27.849.140.000,- kemudian untuk layanan siaran dan pemberitaan siaran luar negeri sebesar Rp885.794.000,- untuk layanan siaran dan pemberitaan program dan produksi, yakni sebesar Rp835.400.000,- Kemudian untuk layanan siaran dan pemberitaan di 67 satuan kerja Rp13.674.907.000,- dan terakhir untuk layanan siaran dan pemberitaan di pusat pemberitaan sebesar Rp4.061.983.000,-

Berikutnya izinkan kami untuk menyampaikan usulan tambahan anggaran belanja modal LPP RRI Tahun Anggaran 2025, yakni sebesar Rp418.503.829.400,- yang mana terdiri dari, pertama kekurangan anggaran untuk penyelesaian pembangunan fisik dan interior gedung penunjang siaran luar negeri, yakni berjumlah Rp57.584.337.000,-. Dua, kekurangan anggaran pembangunan gedung kantor RRI Jayapura paska gempa senilai Rp14 miliar. Tiga, pengadaan pemancar FM untuk *support* DRM sebesar 3 Kilo Watt untuk *relay* dan kelengkapannya di 4 lokasi senilai Rp6.204.640.000,- keempat adalah untuk pengadaan mixer digital untuk 30 satuan kerja dengan nilai 6 miliar. Lima adalah pengadaan pemancara FM DRM beserta peralatan pendukung untuk 13 lokasi sebesar Rp31.826.912.000,- juga pengadaan pemancar FM DAB sebesar 5 kilo watt dan kelengkapannya untuk 4 satuan kerja sebesar Rp14.582.926.400,-

Nomor tujuh berikutnya, pengadaan pemancar SB *support* DRM berukuran 50 kilo watt dan kelengkapan untuk siaran luar negeri sebesar Rp30 miliar. Nomor delapan, untuk sewa pemancar SW di luar negeri sebesar Rp4 miliar. Nomor sembilan adalah digitalisasi stasiun penyiaran untuk 17 Korwil LPP RRI, peralatan studio, dan MCR sebesar Rp127.500.000.000,-. Sepuluh adalah pengadaan remote monitoring pemancar radio sebesar Rp23.991.984.000,-. Sebelas, untuk pengadaan wincam studio sebesar Rp46.444.200.000,- serta untuk pengadaan transmitter SW sebesar 100 kilo watt sebesar Rp56.396.130.000,-.

Terkait kelanjutan pembangunan gedung penunjang siaran luar negeri, kami tadi sampaikan adanya kekurangan anggaran untuk kelanjutan

pembangunan gedung penunjang siaran luar negeri sebesar 57,5 miliar. Gedung ini sebetulnya telah dibangun sejak Tahun 2021 sebelum saya menjadi dirut, namun sampai sekarang belum selesai diutilisasi karena belum selesai gedungnya.

Pada dasarnya kebutuhan anggaran kami sebesar Rp84.226.537.000,- akan tetapi dari kebutuhan itu sudah kami alokasikan dari pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.624.500.000,- yang akan dipergunakan untuk membiayai fisik bangunan. Namun demikian, secara keseluruhan untuk menyelesaikan pembangunan gedung itu masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp57.584.037.000,- yang detailnya terdiri dari pembangunan fisik bangunan sebesar Rp21.584.037.000,- dan interior sebesar Rp36 miliar.

Kemudian perihal pembangunan gedung paska gempa RRI Jayapura senilai Rp25 miliar, sebagaimana kamu ajukan. Pembangunan gedung ini sesungguhnya sangat *urgent* mengingat gedung ini sekarang dalam kondisi tidak layak karena gedung kantor mengalami rusak berat akibat pada Februari 2023, sehingga untuk kegiatan operasional RRI Jayapura saat ini menggunakan bangunan darurat.

Berikutnya, izinkan kami menyampaikan program unggulan yang dilakukan di satuan kerja RRI Tahun 2025. Yang pertama adalah produksi podcast tematik tentang UMKM, pengentasan kemiskinan, stunting, investasi, dan inflasi yang ada di suatu wilayah atau Indonesia, juga literasi digital yang mendukung Asta Cita keempat, yakni memperkuat pembangunan, SDM saint, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta memberikan ruang bagi perempuan, pemuda, dan disabilitas.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan langkah strategis yang dilakukan LPP RRI dalam menghadapi disrupsi media dan upaya RRI untuk meningkatkan relevansi kami bagi publik, menyadari disrupsi telah mengubah media habit masyarakat dan konsumsi media konvensional ke media digital. Kami terus memperkuat kehadiran konten RRI di *platform-platform* digital dan ruang lain, di mana kami bisa memperkuat layanan kami.

Mohon izin untuk memutar iklan kami.

(MEMUTAR VIDEO IKLAN LPP RRI)

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Siapa itu, Pak Dirut? Pak Dirur, siapa itu, Pak?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Bapak-Ibu, demikian RRI, iklan RRI dalam 5 wajah di mana terlihat nilai-nilai ke Bhinnekaan yang menjadi kekhasan atau *positioning value salary* dan kini kami terus memperkuat portal berita *online* kami yang terus bertumbuh dan untuk memperkuat kekhasan kami, kita berproses bekerja sama dengan Pemda dan Pemrov di seluruh Indonesia, supaya RRI menjadi

sumber informasi tentang program dan kebijakan yang dilakukan Pemda dan Pemprov. Juga ada info parlemen di mana kami bekerja sama dengan Sekjen DPR untuk mewujudkan berita-berita parlemen serta info KL lainnya yang sedang kami proses.

Kami juga memiliki RRI digital di mana merupakan *platform* kami, di mana masyarakat bisa menikmati layanan kami seperti streaming dari seluruh RRI di Indonesia, *chat* dengan penyiar, *playlist* lebih dari 500 ribu berbagai lagu, *podcast*, dan sebagainya dan ini terus kami promosikan.

Untuk memperkuat transformasi yang kami lakukan, kami juga secara intensif melakukan kegiatan peningkatan, peningkatan kompetensi SDM RRI mengenai *in house capacity bulding* dari 4.580 karyawan. Selama periode kepemimpinan kami sebanyak 85% telah kami lakukan pelatihan dan 5% adalah pelatihan pengulangan ya dan mayoritas jenis pelatihan sekitar 68% adalah pelatihan yang menyangkut *core business*.

Hal lain yang bisa kita sampaikan adalah RRI telah melakukan uji coba siaran digital terrestrial DRM dengan fungsi *early warning system* dengan pemancar di 5 titik, yakni Bogor, Padang, Purwokerto, Banten, dan Ende. Dan terkait dengan itu selain siara tanggap bencana yang sudah ada di kami, kami juga terus memperluas siaran edukasi terkait perubahan iklim dan dampaknya.

Dan terkait dengan Pilkada Serentak pada bulan November 2024, RRI menyelenggarakan siaran khusus program pilkada berjudul “Daerah Memilih” dengan tagline kanal pemilihan cerdas, kegiatan yang sama kita lakukan menjelang pemilihan legislatif beberapa waktu yang lalu. Di mana untuk kegiatan ini *launching* siaran akan dilakukan secara serentak pada 6 September yang akan datang.

Kegiatan ini dilakukan dalam berbagai format seperti dialog interaktif di dalam atau di luar studio, talkshow, maupun pentas musik, maupun kegiatan lainnya.

Demikian Bapak-Ibu Pimpinan, Anggota Komisi I DPR RI, telah kami sampaikan materi pembahasan RKA LPP RRI Tahun Anggaran 2025. Kami mohon masukan, dukungan, dan kami ucapkan terima kasih.

WAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Pak Dirut, pertanyaan yang sama ada perubahan *enggak*? Tidak ada.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Terus kalau LPP TVRI tadi disampaikan bahwa akan mendapatkan alokasi jumlah pegawai baru dalam rekrutmen 2024 sebesar 3.606, RRI dapat berapa.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Kalau terkait dengan penambahan pada umumnya dari Kementerian Keuangan menyesuaikan langsung, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Bukan, kan ada alokasi kan mestinya, TVRI ada.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Oh, 1.000, sekitar 1.000.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Berapa?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

1.000.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

1.000.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

1000 CPNS, iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

1000 CPNS untuk yang besok ini?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Terus yang P3K berapa?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

P3K kemarin 700, sekitar 700.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Sudah?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Sudah.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

700, iya oke.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, sudah dipaparkan semuanya dan sesungguhnya tidak ada perubahan kecuali permasalahan *Automatic Adjustment* dan tambahan usulan tambahan dari Sesjen Wantannas, juga tambahan TVRI, dan RRI.

Untuk itu, silakan dari meja Pimpinan sudah mendaftar yang pertama Pak Sturman Panjaitan, persiapkan Bu Nurul.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih Pimpinan yang luar biasa.

**Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati, saya banggakan,
Bapak Direktur LPP TVRI dan jajaran dengan dasinya bagus banget, Pak
Dirut LPP RRI dan jajaran, dan Sesjen Wantannas dan jajaran,**

Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Shalom.

Bapak-Ibu sekalian, saya tadi karena datang lebih, masuk lebih awal, Pak, jadi saya coba perhatikan-perhatikan apa yang mereka tulis di 3 komponen bangsa, elemen bangsa, atau lembaga yang ada di tiga ini. Saya lihat pertama, mohon maaf, Pak, saya menilainya tidak dari anggaran kan tidak banyak berubah. Dari Sesjen Wantannas ini 7 halaman itu tulisan semua, Pak, 7 halaman ini tulisan angka-angka hampir *enggak* ada. Kemudian TVRI ada 18 banyak angka-angka disitu, RRI sekitar 17 juga.

Artinya kalau saya bayangkan ini, bayangkan saja kalau Wantannas itu dengan angka-angka setengah halaman cukup kayaknya, karena cuma 50 miliar plus tambahannya. Jadi Pak Sesjen ini pintar dia, jadi supaya agak kelihatan tebal pakai tulisan, Pak, kalau *enggak* cuma setengah halaman. Bandingkan 50 miliar dengan 1 triliun itu *loh*, kalau 1 triliun kan bisa halaman pertama 200 sekian miliar, halaman kedua 100 sekian, dan uraiannya *bla, bla, bla*.

Jadi memang, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi I, saya sebenarnya apa yang ditulis oleh Pak Sesjen Wantannas ini, mereka ini ada rapat yang luar biasa *loh* sebenarnya. Sifat, yang sifatnya darurat dan terencana khususnya sidang dewan ini. Ada sidang dewan membahas tentang kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, *sangar jo*. Yang kedua, sidang darurat yang 4 tahun sekali..., *eh* 4 kali setahun, maaf saya, 4 kali setahun tapi anggaran cuma segitu saja, Pak Coki, siapa yang salah di sini ini.

Bbapak bicara tentang *national security*, bicara tentang keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bandingkan dengan LPP TVRI dan RRI hanya bicara tentang siaran TV dan siaran radio, *kok* beda banget ya, atau cara berpikir saya yang salah mungkin, Pak Coki. Jadi menurut saya, Pimpinan, apa yang diinginkan oleh Pak Sesjen Wantannas ini tambahan sekian 200 lagi, itu 29 ya, bukan 200 miliar. Tambahannya saja, tambahan TVRI dengan RRI tambahannya saja *enggak...*, *enggak* apa ya, di bawah jauh dari kebutuhan Wantannas secara utuh. Tambah 26 miliar, kemudian tambah 50 berapa tadi itu, jadi *totally*-nya cuma 80?

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B. HUTABARAT, M.M.S.):

88.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

88 miliar, tambahannya di RRI saja sekian ratus, apalagi TVRI sekian ratus. Jadi mungkin untuk, untuk Wantannas ini mungkin kita perlu memperhatikan secara seksama agar mereka juga lebih, lebih mantap lah karena sifatnya nasional, pengamana nasional khususnya.

Kemudian untuk TVRI dan RRI, saya ingin bertanya, Pak, saya *enggak* melihat tadi di anggaran Bapak yang ajukan ini tentang apakah RRI dan TVRI sudah bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia, saya belum melihat itu. Tambahan yang disampaikan oleh TVRI juga, itu hanya untuk saya lihat tadi tambahannya berapa ratus juga ini pelaksanaan pilkada, padahal ini keluarnya nanti 2025. Saya mohon penjelasan dari Pak Dirut TVRI ini, Pak, saya *enggak* melihat ini ada sudah berapa persen *sih* kita sudah membangun seluruh wilayah kita sudah tercakup oleh siaran TVRI dan RRI, saya *enggak* melihat sedikit pun di situ anggaran yang Bapak ajukan tambahan itu. Tambahan-tambahan yang Bapak ajukan itu hanya kalau TVRI itu sifatnya

untuk siaran ada sekitar 300, *eh* berapa, 350 miliar ya, Pak, ya yang tambahan Bapak itu, 825 miliar tambahan TVRI yang diajukan, usulan inisiatif baru tapi saya *enggak* melihat untuk pembangunan siaran TVRI.

Demikian juga dengan RRI, Pak, RRI juga tambahannya sekian ratus miliar tapi *enggak* ada saya lihat untuk siaran itu sudah mencakup *enggak* ke seluruh wilayah NKRI RRI itu. Saya sudah berkali-kali sampaikan di wilayah kami, di dapil kami di Kepri itu kami hanya mendengarkan radio itu dari Singapura maupun Malaysia lebih banyak di situ, Pak. Dan itu bertahun-tahun sampai dengan sudah 79 tahun kita merdeka, Pak. *Nah*, ini kan sangat ironis sekali kalau kita mengatakan bahwa penambahan-penambahan anggaran itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya rutin, untuk mengembangkan siaran RRI ini dan TVRI masih kurang. Mohon penjelasan ini, Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-PKS):

Terima kasih, Pak Sturman Panjaitan.

Selanjutnya Bu Nurul, persiapan Pak Nico.

F-PG (NURUL ARIFIN, M.SI.):

Ketua, terima kasih.

Yang saya hormati jajaran TVRI, RRI, dan Wantannas,

Saya, fokus saya kedua saja TVRI dan RRI. Yang pertama, *sorry* *enggak* ada halaman ini *slide*-nya ya. Jadi diusulan inisiatif baru LPP TVRI Tahun 2025. Di sini, Pak, Nomor 4 ini disebutkan silakan saja tapi saya *enggak* bisa ngomongin ini nomor *slide*-nya ini kalau mau ditayangkan. Kebutuhan tambahan biaya listrik dukungan program DBS, ini ya, oke. Ini saya minta penjelasan.

Kemudian dengan Nomor 5 ini, Pak, kebutuhan pelaksanaan produksi siaran 140 miliar. Inikan bukan angka yang sedikit ya, Pak, angka yang besar. *Nah*, kemudian pertanyaan saya memang selama ini siaran yang Bapak produksi itu apakah belum memenuhi, belum memenuhi kebutuhan begitu, kecukupan waktunya. Terus kalau anda minta tambahan anggaran 140 miliar untuk produksi siaran.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-PKS):

Coba ditayangkan, coba ditayangkan.

F-PG (NURUL ARIFIN, M.SI.):

Untuk produksi, untuk produksi siaran lagi itu produksi siarannya seperti apa, Pak, ya. Sementara sudah ada *nih*, programnya sudah berjalan tapi anda minta baru dengan angka 140 miliar. *Nah*, kami minta penjelasan 140 miliar itu mau bikin apa produksi siaran seperti apa. Itu yang pertama.

Ya, ini ya angkanya sama, Pak, Bapak sudah menjabarkan di apa di *slide* nomor berapa *tuh* saya *enggak* ada nomornya sekali lagi. Tapi saya minta penjelasan karena di sini ada siaran berita, siaran program, siaran internasional, dan TVRI *Sport*. Artinya kan ini keseluruhan ya, tapi *kok* minta lagi anggaran itu terus memangnya program-program yang, yang saat ini diproduksi nanti diproduksi kan itu sudah masuk anggarannya, terus kenapa minta tambahan lagi *gitu* ya, oke. Ini buat TVRI satu itu saja.

Kemudian buat RRI, ini, Pak, di halaman 5 ya, Dirut RRI.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Ya.

F-PG (NURUL ARIFIN, M.SI.):

Ada pengadaan pemancar beserta pendukung itu nilainya 27.849.140.000,- itu di mana saja, Pak? yang pertama, saya minta penjelasan.

Kemudian halaman berikutnya juga karena angkanya tinggi-tinggi *nih*, Pak, ya Rp127.500.000.000,- juta digitalisasi stasiun penyiaran untuk 17 Korwil LPP RRI, peralatan studio dan MCR, itu di mana saja. Terus apakah yang apa yang anggaran kemarin ini belum dilakukan, walaupun sudah dilaksanakan di berapa, di berapa stasiun begitu.

Kemudian tadi saya mencoba me-*review* lagi ya, ini halaman berikutnya. Di sini *enggak* ada halamannya *nih*, Pak, *enggak* konsisten juga *enggak*, *enggak* ngasih halaman *nih*, oh halaman 7. Jadi pembangunan gedung penunjang siaran luar negeri itu jumlahnya 249 miliar sekian-sekian. *Nah*, kemudian ini kan kekurangan-kekurangan yang Bapak minta ya, kekurangannya 57 miliar sekian-sekian. Saya tidak paham *kok* angkanya tidak sama ya, kalau saya hitung ini ada angkanya 168 miliar, kok di sini 57 miliar. Itu saya satu *enggak* ngerti *gitu* ya.

Kemudian ini kan anggarannya berjalan juga dari tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi *gitu loh*, Pak. Ini di sini disebutkan alokasi anggaran pagu indikatif hanya dapat digunakan untuk *finishing* bangunan hingga lantai 11, kan kalau orang mau minta anggaran, Pak, itu kan *enggak* berbicara per lantai, bicarannya gedung begitu, tapi *kok* ini Bapak ngomongnya baru selesai sampai lantai 11. Diperlukan tambahan anggaran total 57 miliar sekian

agar bangunan dapat diutilisasi, finishing bangunan lantai 12, 15, pengisian interior 16, 15, 6 sampai 15. Itu buat saya membingungkan *gitu* ya.

Terus yang terakhir ini, Pak, halaman 8 pembangunan gedung paska gempa RRI Jayapura. *Nah*, ini pembangunannya itu dikatakan masih kurang 25 miliar, sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan selesai 25 miliar. Saya mau tanya, Pak, gempanya kapan *sih*, skalanya berapa *sih*, saya baru buka *sih* di apa namanya di online. Itu skalanya juga *enggak* gede-gede banget, terus kerusakannya seperti apa, terus setelah dibangun seperti apa begitu ya, terus sampai kurang lagi untuk apa *gitu*. Ini yang kecil-kecil begini, Pak, sudah di Jayapura kita juga susah mau ke sananya gitu ya. Saya minta apa transparansi saja supaya kita ini benar-benar apa bisa mempertanggungjawabkan apa yang Bapak minta dan apa yang Bapak kerjakan. Itu saja, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-PKS):

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Nico, persiapan Pak Andika.

F-PDIP (JUNICO B.P. SIAHAAN, S.E.):

Baik, terima kasih.

**Pak Ketua, rekan-rekan Komisi I yang saya hormati,
Para tamu undangan yang telah hadir semua LPP TVRI, LPP RRI,
Wantannas,**

Yang pertama pertanyaan untuk Wantannas, Pak, ini beberapa kali dalam rapat kita sering mendengar ada transformasi ya antara menjadi dari Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional. Menarik, Pak, narasi tersebut dan kita juga mau melihat apakah anggaran yang hari ini ada dan kemudian apa yang menjadi rencana dari Pak Sekjen untuk transformasi ini bisa berhasil. Apakah dengan anggaran ini cukup, apakah dengan menjadi Dewan Keamanan Nasional itu nanti diharapkan juga ada anggaran yang lebih, dan kemudian perhatian yang lebih dari Presiden sebagai pengguna laporan-laporan atau hasil analisis yang dibuat oleh Wantannas. Saya mau bicara di situ saja, Pak, mengenai Wantannas.

Yang kedua, mengenai LPP RRI dan TVRI. Sebenarnya bicara tadi ada angka yang saya hanya mau menanyakan saja di situ ada rekrutmen kan PNS ya, itu menurut saya sangat dibutuhkan hari ini. Cuma apakah anggaran tadi itu ada rekrutmen mandiri *gitu* ya, apakah semuanya dilakukan oleh kementerian yang lain atautkah angka itu dilakukan rekrutmen mandiri. Dan kemudian sesuai dengan pertanyaan atau keluhan-keluhan yang disampaikan beberapa waktu yang lalu mengenai kualifikasi yang masuk ya kan, yang diminta apa, yang datang apa *gitu*. Apakah dengan anggaran ini, ini bisa

mengurangi permasalahan tersebut karena memang kita butuh RRI dan TVRI disegarkan lagi dengan bentuk kreativitas yang cukup berbeda dengan kualifikasi PNS yang lainnya maksud saya.

Kemudian saya mau bertanya soal satu lagi maaf ya, ini saya kalau dengar kata *starlink* itu suka gimana *gitu* ya kan, pengen tahu asja *gitu* ya *enggak* ada angina, *enggak* ada ini tiba-tiba sudah pada masuk di mana-mana begitu ya kan. Tadi di paparannya Pak Dirut TVRI, TVRI sudah menggunakan *non-geostationary satellite orbit* atau NGSO, LEO (*Low Earth Orbit*) *starlink* sejak Desember 2003. Ini bagaimana hasilnya, Pak, boleh ceritakan dengan kita kualitasnya ya kan karena kita *enggak* dengar apa-apa *nih*, *enggak* ada dengar. Kalau DBS atau apa namanya digitalisasi ini kan terdengar sudah disiapkan sejak lama ya, kemudian digunakan karena memang kewajiban kita melakukan migrasi tersebut. Tapi kalau *starlink* ini kita belum dengar, boleh Pak Dirut nanti ceritakan sedikit ke saya.

Dan kemudian juga kami ini tadi berkaitan dengan kemarin Pak Dirut RRI, kami sempat diskusi dengan teman-teman radio karena saya juga orang radio dulu ketemu *nih* dengan kawan-kawan, bercerita mengenai migrasi ke analog, menitipkan itu mengenai mandatori akan migrasi Tahun 2028, teman-teman menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Kenapa? Karena pengalaman di Singapura imigrasi itu di beberapa negara itu dipaksakan dan tidak berhasil, beberapa negara butuh waktu lebih lama lagi. *Nah*, mereka mengusulkan supaya migrasi ini terjadi dengan alamiah, karena bukan apa-apa hari ini saja mereka sudah kesusahan *nih* yang namanya mendapatkan pendengar ya. Orang mendengarkan radio hanya melalui kendaraan misalnya begitu ya, sudah *enggak* ada lagi itu yang punya radio terus mendengarkan radionya lagi, sudah jarang lah bukan *enggak* ada, sudah jarang. Sehingga kalau pindah *nih* sesuai dengan kebutuhan DRM dan DAB ini, oke siarannya bisa yang dengerinnya siapa kan *gitu* kan pertanyaannya itu. Walaupun ada kewajiban RRI untuk tetap melakukan itu sebagai percontohan, tapi mohon dilihat lagi, dipersiapkan juga supaya nanti yang mendengarkan ada. Jangan *entar* ada siaran sendiri, Pak, nanti karena *enggak* ada alat mendengarnya *gitu*, *enggak* ada *receiver*-nya, kira-kira begitu.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Pak Andika, persiapan Mas Rizki.

F-PDIP (ANDHIKA HASAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi I, Bapak Dirut TVRI, RRI, dan Pak Sekjen Wantannas, beserta Pak Dewas dari dua institusi.

Terima kasih atas paparannya diberikan tadi, izinkan kami menanyakan mengenai pertama kepada Bapak Dirut TVR. Pada saat ini memang persaingan, Bapak, dengan media-media TV lainnya di Indonesia cukup ketat. Dan salah satunya memang diprogramkan anggaran satu, di dalam pagu 1,4 triliun ya, Pak, ya di dalam indikatif, pagu indikatif. Dan dalam hal ini kita melihat kinerja, Bapak, di TVRI selama beberapa tahun belakangan ini, itu mungkin ada peningkatan ya, Pak. Tapi ada hal di usulan tambahan Bapak sebesar dari inisiatif Bapak itu kebutuhan rekrutmen pegawai ASN itu 350 miliar ya, Pak, ya.

Nah, apakah usulan Bapak ini mencakup sebuah strategi baru dalam rekrutmen ini, sehingga kinerja TVRI itu bisa lebih bersaing dengan media-media yang ada. Karena yang kami khawatirkan, Pak, penambahan ini hanya mengganti kemampuan yang lama yang bakal pensiun itu. Sehingga dengan penambahan 350 miliar itu bisa menambah Personel-personel yang kompeten, yang bisa memberikan program-program yang lebih baik. Saya melihat *Podcast-podcast* yang ada di YouTube itu tidak terlalu banyak saya menemukan hasil-hasil produk Bapak yang banyak *follower* dan *likes*-nya. *Nah*, itu yang dibandingkan dengan media seperti Media-media swasta tersebut yang memiliki daya serap yang kuat di masyarakat. *Nah*, dengan kami berharap 350 itu apakah langkah Bapak bisa menghadapi itu.

Yang kedua, kepada Bapak Dirut RRI. Pak Dirut, dari anak-anak saya sering dengar RRI terutama masalah sayur, beras, dan lain-lain. Dan *coverage* yang ada di daerah saya ketika di Kalimantan itu sudah cukup baik, sudah cukup baik tetapi beberapa masih banyak daerah yang belum ada internetnya. Belum ada internetnya dan *coverage* RRI seperti di Mahakam Hulu, di daerah yang agak jauh itu, itu masih sulit tidak dapat. *Nah*, Bapak ada permintaan peralatan yang cukup banyak, Pak, di dalam usulan tambahan Bapak, yaitu Nomor 3 sampai Nomor 6 itu ya ditambah dengan Nomor 9 digitalisasi stasiun penyiaran untuk 17 Korwil sebesar 127 miliar, ditambah 30, 14, 31, 66 itu adalah peningkatan kualitas siaran, Bapak. Jadi apakah dengan sistem yang baru ini peningkatan-peningkatan kualitas siaran dan *coverage* semakin bisa lebih maju, Pak, karena beberapa tempat masih belum kami temukan *coverage*, Bapak itu.

Yang terakhir, kepada Bapak dari Wantannas, Pak. Pada Tahun 2020 itu ada Covid-19 dan salah satu dari ketahanan, ketahanan nasional kita adalah keluar dari krisis tersebut. Dan keluar dari krisis tersebut mungkin presiden langsung mengambil langkah-langkah, langkah-langkah strategis untuk menghadapi persoalan yang simpang siur pada waktu itu. *Nah*, dengan penambahan 26 miliar, jadi 54 Bapak ada usulan 26 miliar lebih banyak ke arah dokumen. Apa saja yang Bapak siapkan untuk ketahanan nasional nanti selain hanya ideologi, ideologi sangat penting. Jadi ideologi maupun juga tadi ada persoalan bangsa di Korupsi, Narkoba, judi, dan penyelundupan tersebut itu bagian daripada program Bapak sebelumnya. Apakah dengan penambahan ini, itu bisa menambah lagi ketahanan nasional kita di mungkin ketahanan pangan dan dua prioritas pertama tadi. Kami mohon arahan dari, pandangan dari Bapak.

Demikian, kami ucapkan terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-PKS):

Terima kasih, Pak Andika.

Mungkin sekedar informasi juga buat temen-temen sebenarnya ada, ada sebuah pertanyaan kebutuhan 2.300 sekian apa PNS baru, pendaftarinya cuma 3.000 itu. Menarik kan biasanya padahal pendaftar itu *wah* sekian kali lipat, tapi memang saya mencoba untuk masuk ke SSCASN itu, jadi kalau kita ini misalnya jurusannya akuntansi *enggak* bisa asal daftar di, jadi peluangnya hanya ini kamu *gitu*. Sehingga saya kira ini nanti kita akan bisa mendapatkan SDM yang lebih baik *gitu* sesuai dengan yang kita inginkan. *Enggak* ada lintas tiba-tiba semua orang daftar ke satu peluang tertentu karena secara sistem sudah tidak mungkin, misalnya S1 Akuntansi tiba-tiba mau ngambil jurusan desain grafis untuk TVRI *enggak* bakalan bisa karena peluangnya tidak ada di situ.

Jadi saya kira sebenarnya ini hal yang secara sistem bisa diatasi, sehingga tidak pendaftarinya 100.000 padahal peluangnya hanya misalnya 100 orang. Sekarang kebutuhan 2.000 yang daftar hanya 3.000 berarti ini mungkin sudah diseleksi *by system* ya. Saya kira baguslah.

Pak Rizki, silakan, persiapan Pak Slamet.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pencerahannya tadi luar biasa, Pak, karena itu jadi *concern* banyak orang bukan hanya yang di pusat tapi yang di daerah-daerah pun terkait dengan CPNS ini menjadi *concern* dari generasi muda di banyak, banyak tempat. Saya jamin singkat, Pak Ketua, pengalaman saya dan *enggak* terlalu bikin pusing mudah-mudahan.

Pertama, untuk Pak Sesjen Wantannas, Pak Deputi, beserta jajaran tadi saya agak seirama sama senior saya Pak Sturman, kayaknya kita harus kirim banyak-banyak doa ini untuk Wantannas, Pak Ketua. Dan saya mau *Challenge* Pak Sesjen Wantannas, Bapak punya sekitar 45 hari lagi untuk pengatur membuat waktu bagaimana nanti mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ketua Wantannas. Karena sampai saat ini kayaknya masih belum pernah ada pertemuan di mana Sesjen Wantannas bertemu dengan Ketua Wantannas. Ketua Wantannas sebentar lagi akan pamit, mudah-mudahan mempunyai hati untuk ketemu dengan anak-anaknya di Wantannas. Itu doa saya untuk ke Wantannas yang pertama.

Doa saya yang kedua, Presiden, *eh* ada Bu Ketua, ini mudah-mudahan ke depan naik terus karirnya kita doakan, Pak. Doa saya yang kedua untuk Wantannas ini, banyak doa untuk Wantannas, Pak, karena saya melihatnya

agak risau. Bapak-bapak ini mencapai posisi yang Bapak-bapak sekarang duduki ini dengan penuh disiplin, dengan perjuangan yang luar biasa, dengan dedikasi yang luar biasa. Ingin memperjuangkan bagaimana prioritas nasional 1 sampai 7 bisa kita realisasikan, tapi dukungan anggarannya hanya sekitar 56 miliar mungkin hanya seperkian persen dari anggaran tahunan divisi 2 Kostrad di Malang, Pak, ya. Jadi mungkin ini perlu kita dorong sama-sama dan kita harap karena Presiden terpilih 2024-2029 adalah pakar pertahanan, orang yang sangat peduli terhadap pertahanan ketahanan negara. Dan saya yakin mempunyai visi yang baik untuk memperkuat Wantannas. *Nah*, mudah-mudahan ini ke depan bisa diperkuat dari kelembagaan, dari urusan regulasi, maupun dukungan anggaran.

Tapi tadi Bapak menyampaikan ada 64 orang pegawai tambahan yang akan dialokasikan kepada Wantannas dan membutuhkan anggaran tambahan, Pak, ya. Pertanyaan pertama saya, kalau sampai anggaran ini tidak dipenuhi skema pembayaran gajinya bagaimana itu, Pak, untuk pegawai yang akan dialokasikan 64 tambahan kepada Wantannas.

Kedua, kalau kita ingin menjadikan Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional, Pak, dan saya yakin semua juga mendukung, tapi kan pasti ada reorganisasi itu, Pak, di dalamnya. *Nah*, pertanyaan saya selama ini apakah dalam internal Wantannas itu sendiri sudah turut mempersiapkan agar perubahan dari Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional atau *National Security Council* itu bisa terealisasi secara cepat, bisa terealisasi secara baik. Kita punya pengalaman sekarang kita sedang ada Pansus Rancangan Undang-Undang Kelautan, Pak, itu ingin mengharmonisasi kebijakan negara di soal keamanan laut. Antar lembaganya belum bersetuju, baik itu Angkatan Laut, Bakamla, dan lain sebagainya. Kalau sampai Wantannas nanti berubah menjadi Dewan Keamanan Nasional, saya yakin dalam internal Wantannas sendiri akan terjadi reorganisasi, dan akan ada penambahan wewenang ataupun pengurangan wewenang dari Wantannas itu sendiri. Apakah ini sudah diantisipasi agar pada saat nanti DPR membahas undang-undangnya dari internal Bapak sendiri sudah siap untuk merealisasikan hal tersebut.

Untuk TVRI dan RRI, saya *enggak* banyak pertanyaan ini anggaran yang akan dilaksanakan pemerintahan ke depan. Tapi saya pertama ingin apresiasi karena apa yang saya coba suarakan dari 2019 sama Pimpinan, sama Anggota Dewan di Komisi I sampai 2024 *Alhamdulillah* terealisasi. Terutama TVRI membuat stasiun siaran di Provinsi Banten, Pak, saya apresiasi karena kalau *enggak* kalau kata Pak Kharis namanya kufur nikmat, Pak. Saya apresiasi dan masyarakat Banten juga menyambut baik, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kualitas siaran produksi di Provinsi Banten, mudah-mudahan itu bisa menjadikan TVRI menjadi tujuan bekerja nanti untuk generasi muda di Provinsi Banten. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan.

Demikian juga untuk RRI, pertanyaan singkatnya apakah ada pos tambahan anggaran untuk anggaran 2025 nanti yang akan dialokasikan, baik

untuk *refurbishment*, baik itu peningkatan kualitas untuk stasiun siaran di Provinsi Banten nanti.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Terima kasih.

Terakhir Pak Slamet, silakan.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi I dan Anggota yang sangat saya hormati,
Sekjen Wantannas RI dan beserta jajaran yang saya hormati,
Bapak Dewas LPP TVRI, Bapak Dirut, Bapak Dirut TVRI, dan Bapak
Dewas LPP RRI yang saya hormati beserta jajarannya,**

Pertanyaan pertama kepada Wantannas RI, mengingat pada Tahun 2024 total anggaran yang ada yang dialokasikan untuk program prioritas nasional adalah 2,5%. Dan mengingat anggaran pada Tahun 2025 yang RAPBN-nya yaitu 54,7 miliar, dan untuk prioritas nasionalnya yaitu menurun di angka 0,4%. Pertanyaannya apakah penurunan alokasi anggaran untuk prioritas nasional pada Tahun 2025 dari 2,5% menjadi 0,4% apakah sudah mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk mendukung proses realisasi dan penguatan kelembagaan tersebut.

Dan untuk LPP TVRI dan RRI, ini kan lagi tren, Pak, terkait politik Tahun 2024 kan, tentunya nanti akan mengimbas pada Tahun 2025. Jadi kami menginginkan ada kebijakan tentang penyiaran penyeimbangan antara politik, antara agama, antara pendidikan sehingga tidak lagi ada apa namanya dikatomi terkait campur aduk politik, agama, dan sebagainya. Sehingga pertanyaan kami bagaimana keseimbangan antara siaran pendidikan, politik, agama, dan budaya, dan konten pendukung transformasi digital yang perlu kita kembangkan. Mungkin itu saja, Pak.

Terima kasih.

WAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Terima kasih, cukup ya? baik.

Bapak-Ibu sekalian, pendalaman sudah dilakukan dan kita menunggu jawaban. Kita mulai dari Sesjen Wantannas, silakan Pak Sesjen Wantannas.

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B. HUTABARAT, M.M.S.):

Terima kasih, Pimpinan rapat.

Selamat datang Ibu Ketua Fraksi,

Untuk pertama dari pertanyaan Pak Sturman, sudah *enggak* ada. Saya terima kasih untuk Pak Sturman atas keprihatinan Bapak terhadap Wantannas, Pak. Justru itu kami butuh dukungan dari Komisi I, jadi semoga Wantannas jadi benar-benar Dewan Ketahanan Nasional bukan Dewan Tahan Panas, Pak.

Untuk dari pertanyaan dari Bapak Nico Siahaan, dari Dewan Ketahanan menjadi Dewan Keamanan Nasional seandainya nanti ada. Jelas fungsi dari, dari Wantannas ini akan, akan lebih meningkat. Jadi pada intinya sebenarnya di awal sejarah yang terjadi ini, peranan yang dilakukan oleh Wantannas ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan Dewan Keamanan Nasional itu sendiri. Jadi seperti pernah saya bilang pada RDP yang lalu, apa arti sebuah nama sebenarnya fungsinya sama tapi namanya ini cuma bedanya adalah ketika Wanhankamnas sebelum ini Orde Baru fungsi kami ditambah membuat GBHN itu saja. *Nah*, akan tetapi dengan menjadi Dewan Ketahanan Nasional ini diantaranya, ini diantaranya secara nama. Nama Ketahanan Nasional yang di akhirnya disebut kalau di Inggris kan menjadi *resilience* itu tidak equivalen dengan *Security National*, *Security Council* yang di negara-negara lain. Yang pernah kami sampaikan bahwa akhirnya pada rapat-rapat setingkat *national security council meeting* di dunia kita tidak pernah diundang, sehingga kita juga tidak bisa memasukkan agenda keamanan, keterlibatan negara kita ini terhadap keamanan dunia kepada *United Nation* ini salah satu, salah satu diantaranya.

Dengan demikian, sebenarnya dengan atau diganti atau tidak diganti sebenarnya tidak masalah, selama dari pemerintah itu menyatakan bahwa fungsi *national Security Council* itu ada di Wantannas sebenarnya itu. Seperti dengan Bakamla, kasus Bakamla ketika dunia bertanya yang mana *sih coast guard* kita. Sebenarnya tanpa diganti namanya *coast guard* ya namanya Bakamla saja, tapi fungsi *coast guard* itu memang berdasarkan undang-undang memang sudah diperankan oleh Bakamla sebenarnya. *Toh* juga misalnya Jepang menulis *Japan Coast Guard*, di dalam bahas Jepang bukan *coast guard* dan Indonesia bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu.

Lalu tadi ada pertanyaan juga, apakah dana yang di kami minta tambahan tadi itu cukup. Kalau dibilang cukup kami akan bilang cukup, tapi kalau bilang kurang saya juga bisa bikin jadi kurang, *gitu*. Tapi kami berupaya realistis karena anggaran yang kami ajukan saat ini adalah anggaran yang lebih untuk kepentingan *Meeting*, *Meeting* yang secara, secara lebih ke

pertemuan daripada pengumpulan data, kalau seandainya kami menggunakan sistem yang lebih komprehensif atau sistem yang lebih *Complicated* bisa saja, kami menciptakan seperti pusat data, pusat informasi untuk mencari informasi secara elektronik, tapi kami sementara lebih mengutamakan lebih realistis meminta anggaran yang hanya untuk sekedar *Meeting*.

Untuk Andika Hasan, terima kasih Covid-19 sudah kita bisa menangani dengan baik negara ini. Pertanyaannya adalah apakah dengan, bagaimana dengan ketahanan-ketahanan nasional yang lainnya. Apakah anggaran yang kami bikin ajukan bisa cukup untuk menangani ketahanan-ketahanan nasional lainnya. Kami berupaya melakukan istilahnya *do more with less*, artinya pendekatan kami ini terpadu yang dilibatkan dengan Kementerian-kementerian lain. Jadi ketika kami menggunakan anggaran itu tidak terlalu banyak, sebenarnya Kementerian lain yang kami undang ini banyak informasi yang kami dapat dari Kementerian-kementerian lain. Jadi kami melakukan mengkoordinasikan, atau mengkolaborasikan informasi-informasi, atau saran-saran dari Kementerian-kementerian lain. Tapi seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Rizki, sebenarnya marwahnya itu yang lebih penting dibanding sekedar anggaran kalau buat kami pribadi. Karena kalau misalnya kami mengundang yang datang hanya tingkatan, ya mohon maaf ya tidak mengurangi menghargai seseorang, levelannya yang tidak bisa mengambil keputusan jelas *meeting* kami jadi tidak, tidak berfungsi dengan optimal.

Jadi terima kasih sebagai penutup juga dari Pak Rizki tadi menambahkan. Terima kasih atas doanya, Pak, *aamiin ya robbal alamin*. *Challenge*, Bapak, *Insyah Allah* kami terima, Pak, secara pribadi kami sebagai militer sering ketemu sama beliau tapi saya tidak tahu ketika beliau menjadi, menjadi Presiden terpilih mungkin karena dengan kesibukan mungkin agak lebih sulit, tapi *challenge* Bapak saya ambil, Pak.

Terus betul.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Maksudnya Pak Rizki untuk ketemu dengan ketua baru atau ketua lama.

**SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B.
HUTABARAT, M.M.S.):**

Ketua baru, Pak.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Saya *challenge* untuk ketemu sama ketua lama dalam 45 hari ke depan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Ketua lama ini, Pak, jangan salah.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Dan doa kedua saya, doa kedua saya mudah-mudahan karena.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Ketua baru, baru akan dilantik nanti, Pak.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Yang baru nanti akan dilantik datangnya dari pertahanan pasti hatinya lebih terbuka untuk ketemu Bapak. Kalau ada apa-apa nanti lapornya sama Bu Meutya, Pak.

Terima kasih.

**SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI Dr. T.S.N.B.
HUTABARAT, M.M.S.):**

Sebenarnya kalau hanya ketemu saja, Pak, kemarin di Bali kami ketemu bertiga juga dengan yang lama dan yang baru, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Rapat maksudnya, Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B.
HUTABARAT, M.M.S.):**

Baik, terima kasih.

Untuk anggaran ya betul anggaran sebelum ini kami pernah jadi Panglima Armada, anggaran kami ini tidak ubahnya anggaran satu kapal. Sebagai panglima armada kapal saya ratusan, jadi ya kami menyesuaikan.

Lalu tadi ada pertanyaan dari Bapak juga seandainya PNS ini anggaran, PNS yang kami terima tidak sesuai dengan jumlah yang kami ajukan. Terus terang ini daftar, daftar ini dari PANRB dan anggarannya sudah diikuti dengan anggaran yang di Menteri Keuangan. Jadi harapan kami yang sekarang kami perlukan adalah justru kalau anggaran itu datang, kami siap untuk kondisi ruangan sebenarnya karena ruangan kami sempit, kami juga bingung. Mungkin nanti saya akan perintahkan Senin-Kamis ada yang berdiri kali, karena memang tempatnya kecil sekali. *Nah*, kalau sudah begini tentu

kami akan membutuhkan pembangunan gedung. Tapi kalau Ibu Kota pindah juga jadi kosong juga ruangan saya, jadi bisa juga mungkin. Nanti makanya ini kami belum masukkan anggaran untuk itu.

Terus tadi ada pertanyaan juga apabila Wantannas pindah ke, berubah menjadi apa Dewan Keamanan, apakah reorganisasi kami bisa cepat. Reorganisasi kami ini bisa kami jalankan dengan cepat karena sebenarnya pada intinya kami tidak berubah secara organisasi itu secara besar, tapi hanya fungsi jadi bisa dengan cepat. Berbeda dengan Bakamla yang di mana ada unsur-unsur kapal dan unsur-unsur aturan-aturan yang harus berubah. Sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi kami yakin bahwa reorganisasi kami ini bisa berjalan dengan cepat dan kami siap dengan anggaran yang memang sudah ada. Karena seperti tadi kami bilang selama kami hanya berdasarkan *Meeting* kami tidak terlalu membutuhkan anggaran, ya memang kurang saat ini tapi biasanya terus terang saja kalau *Meeting* itu nanti ujung-ujungnya kepada apa namanya bayarnya apa namanya, honor.

Justru terus terang, aduh mau ngomong saja susah. Terus terang kami malu melihat honor tersebut, misalnya seorang menteri datang kami kasih honor ini, ini kenyataan seorang menteri kami kasih honor ketika saya pangkat saya kolonel saja honorinya lebih besar dari itu kami kan sedih juga. Sebenarnya kami tidak, menurut kami ini tidak, tidak manusiawi juga kita memperlakukan seorang menteri misalnya seperti itu atau pakar misalnya. Pakar-pakar yang Profesor-profesor itu yang titelnya banyak banget sangat tidak manusiawi sebenarnya, tapi itulah kami harus menundukkan kepala pada saat kami *Meeting*. Jadi, ya tapi mereka tidak mengurangi semangat-semangat mereka, ini perlu apresiasi pada.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, izin, Pimpinan.

Mungkin saya pendalaman.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Ini tarif honorinya terlalu rendah ya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Saya bicara, itu kan bukan standar dari kemeneterian honor itu.

**SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B.
HUTABARAT, M.M.S.):**

Betul, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Standarnya memang rendah sekali?

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI Dr. T.S.N.B. HUTABARAT, M.M.S.):

Sebentar.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Berapa, Pak, jumlahnya, Pak, angkanya? Sampai 25 juta?

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

750.000,- Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Per hari?

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Satu session.

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI Dr. T.S.N.B. HUTABARAT, M.M.S.):

1 jam 400.000 an, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

750.000?

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B. HUTABARAT, M.M.S.):

1 jam 400.000,-

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

400.000 itu?

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B. HUTABARAT, M.M.S.):

400.000,- satu jam.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Rupiah maksudnya kan?

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B. HUTABARAT, M.M.S.):

Alhamdulillah Rupiah, Pak, jadi kalau misalnya jadi, jadi pembicara itu kan sebentar sekali, Pak, sebenarnya 1 jam itu kadang-kadang sudah balik, *enggak* hampir satu jam itu jadi hitungan menit malah mungkin.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Bukannya ada standar masing-masing itu, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Standar keuangannya, Kementerian Keuanga begitu, Pak, Narasumber itu begitu.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Kok di Kementerian Keuangan kalau kita sama mereka beda itu.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Kapan Bapak diundang Kementerian Keuangan?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Di Baleg, Pak, dengan pajak itu maafkan saya kalau saya jujur 10 juta, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Ah, enggak percaya aku.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Percayalah, Pak, padaku. Saya terima kasih, Pak, masa perlu tunjukkan struknya.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Kayaknya *gini*, Pak Ketua, memang saya pernah melihat waktu itu Pak Sturman diundang sebagai pakar pas dikasih honorinya biasanya kebiasaan beliau itu mengembalikannya lagi, Pak, malah kasihan.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ya, saya kembalikan kepada istri saya, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Ya, sekarang *gini* saja lah sudah di Wantannas segitu, di tempat lain mungkin beda.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Artinya, Pak, kita juga pernah ke apa namanya dewan apa itu? Perminyakan itu, itu 4 juta, 5 juta.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Intinya harus kita perkuat.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Sudah kita *enggak* usah ngomong yang lain.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Artinya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Kita ngomong di sini saja.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Artinya, Pak, sudah waktunya ditingkatkan, maksud saya begitu, Pak.

Terima kasih.

**SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS (LAKSDA TNI DR. T.S.N.B.
HUTABARAT, M.M.S.):**

Baik, terima kasih atas *support*-nya, mudah-mudahan memang ada peningkatan. Selanjutnya dari Pak Slamet Ariyadi menanyakan tadi tentang penurunan anggaran terhadap prioritas negara, bahwa prioritas yang kami terima itu sesuai dengan yang dimintakan oleh pemerintah kepada kami. Dan untuk anggaran kami mereka cukup untuk menjalankan tersebut.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Lanjut ke LPP TVRI.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Izinkan untuk menjawab pertanyaan pertama ke Pak Sturman, terkait dengan *coverage* wilayah siaran kami. Jadi perlu saya sampaikan, Pak Sturman, saat ini TVRI memiliki sekitar 177 pemancar digital, yaitu dengan *coverage* siaran sekitar 73% dari belum populasi ya. Jadi memang belum *full* tapi *Insyah Allah* nanti ada penambahan pemancar yang dihibahkan dari Kominfo sebesar 199 pemancar itu akan melonjak sampai 93%, Pak, dalam 3 tahun ini, Pak, direncanakan.

Dan untuk Ibu Nurul, terkait dengan pertanyaan biaya listrik. Pertama ya biaya listrik sebesar 12 miliar sekian untuk, itu adalah biaya listrik untuk anggaran dari 119 pemancar yang dihibahkan oleh Kominfo. Jadi pihak Kominfo akan menghibahkan 119 pemancar tapi hanya barangnya saja, Bu, tidak dengan komponen listriknya semuanya generator. Jadi kita harus mengisi juga, Bu, kalau *enggak* di isini artinya *enggak* bisa beroperasi pemancar tersebut. Betul, Pak, betul, betul, betul, Bu, *enggak*, *enggak* ini hanya sekali saja.

Kemudian mengenai biaya tambahan untuk program, 140 miliar itu memang saat ini biaya untuk anggaran untuk program berita di TVRI hanya 207 miliar, Bu, 207 miliar itu tidak cukup sebenarnya untuk membiayai 4 kanal TVRI nasional, sport, kemudian TVRI World, dan 32 stasiun penyiaran daerah. Jadi biaya total anggaran 200 miliar itu hanya buat setahun, kita bisa bayangkan kalau swasta itu sebulan, Bu. Jadi memang *enggak* cukup maka kita mengajukan 140 miliar untuk tambahan.

Selama ini konsekuensinya dengan kekurangan anggaran ini adalah kita banyak melakukan program rerun, Bu, terutama di hiburan. Dan kita juga tidak bisa banyak membuat program-program hiburan seperti musik, kemudian serial, drama jadi lebih banyak ke berita. Jadi kita butuh program-program tambahan, jadi memang 140 miliar itu untuk dialokasikan untuk penambahan program, termasuk untuk pembelian hak siar di TVRI Sport, Bu, kayak untuk olahraga, bulu tangkis, dan sebagainya, dan juga TVRI World. Jadi memang masalahnya yang 200 miliar itu tidak cukup untuk kebutuhan selama ini, jadi kita mencoba mengajukan untuk tambahan lagi.

Betul, Bu, jadi memang kita diminta oleh pemerintah untuk mendirikan studio juga di sana. Jadi ketika nanti studio itu harus berdiri kita mau *enggak* mau harus membangun, membangun studio di sana, Bu. Yang membangun untuk gedungnya TVRI, *eh* gedungnya PUPR ya tapi untuk isinya itu dari TVRI, Bu, kayak ke studio, kamera, dan semuanya. Jadi memang, tapi itu

belum jelas juga belum, Bu, belum jelas. Jadi ya tapi kalau seandainya nanti diminta untuk membangun ya kita sudah siap *gitu*.

F-PG (NURUL ARIFIN, M.SI.):

Artinya, Ketua, saya kan pengennya setiap tahun itu ada evaluasi, apa yang diminta dan apa yang diselesaikan begitu. *Nah*, kayak begini-begini kita kan *enggak* tahu *nih*, tahun lalu sudah minta, tahun sekarang minta lagi, terus yang tahun lalu bagaimana begitu evaluasinya. Seperti ini IKN belum berjalan tapi sudah minta *gitu*, studionya belum ada.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Saat ini kita sudah mempunyai studio sementara, Bu, di IKN bersama RRI juga tapi hanya sementara, dan sudah ditinjau oleh Bapak Presiden juga.

Baik, kami lanjutkan untuk pertanyaan Pak Nico terkait dengan rekrutmen. Saat ini rekrutmen tetap di Kominfo, Pak, jadi kami TVRI tidak bisa melakukan rekrutmen mandiri, ya jadi semua tetap di Kominfo. Jadi kita masih menunggu karena memang dalam, dalam PP yang baru mengenai TVRI PP 4 Tahun 2024 ada pasal yang menyebutkan untuk adanya pendelegasian kewenangan dari presiden kepada direktur utama terkait dengan pembinaan kepegawaian. Jadi kita masih menunggu Keppres-nya, nanti kalau ada Keppres dari Presiden untuk pendelegasian kewenangan terhadap pembinaan Kepegawaian, maka kami bisa melakukan rekrutmen secara sendiri, Pak.

F-PDIP (JUNICO B.P. SIAHAAN, S.E.):

Izin, Pak Ketua, itu angka yang ada di presentasi apakah itu mempersiapkan nanti gaji dan lain sebagainya, Pak Dirut.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Betul, Pak, jadi itu untuk, untuk biaya kebutuhan gaji dan sebagainya untuk yang pegawai baru tahun depan itu ya.

Dan mengenai kualitas starlink, jadi perlu saya sampaikan kalau di TVRI untuk momen-momen, misalnya khusus kenegaraan ya kami tetap memakai satelit, Pak, maksudnya tidak memakai starlink ya, jadi kita pakai SNG. Jadi *dedicated satellite* jadi itu lebih stabil ya. Jadi kalau starlink menurut pengalaman kami itu, itu karena menggunakan dia memang lebih, lebih cepat karena berada di orbit yang lebih rendah daripada satelit, cuma mereka harus berpindah-pindah satelit *gitu*, Pak. Jadi ada kemungkinan *delay* ketika mereka pindah dari satu satelit ke satelit yang lain, jadi kami tidak berani untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya untuk melibatkan Presiden misalnya. Jadi untuk melibatkan Presiden misalnya seperti kemarin di World Water Forum pembukaannya, *opening*-nya kami tetap menggunakan SNG Van dari TVRI, Pak, kami tidak mau mengambil resiko ada *delay gitu*, Pak,

tapi hanya untuk kalau misalnya reportase berita, kemudian laporan dari daerah itu *enggak* ada masalah pakai starlink.

F-PDIP (JUNICO B.P. SIAHAAN, S.E.):

Mengenai biayanya, Pak, maksudnya *gini* ketika menggunakan starlink pasti ada konsideran iya kan, apakah kecepatan, kualitas, atau ataupun harganya gimana, Pak.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Biaya lebih murah sebenarnya, Pak, starlink ya lebih murah, lebih, lebih cepat ya, lebih cepat, cuma hal-hal tertentu yang kami tidak bisa berani adalah resiko tersebut tadi, Pak. Jadi lebih baik kita agak mahal tapi stabil dan kita menggunakan satu satelit yang kita dedikasikan, *dedicated satellite gitu*.

Kemudian untuk Pak Andika, beliau sedang keluar. Jadi memang mengenai rekrutmen juga ini mungkin bisa menyambung dengan Pak Nico juga. Memang jumlah karyawan, calon CPNS yang, yang dibuka oleh Kominfo sebesar 3.500 sekian itu memang untuk mengisi pegawai-pegawai yang Pensiun. Jadi memang ini masalah di TVRI karena Tahun 2000, sebenarnya dari Tahun 2006 sampai 2015 itu kita tidak ada pasokan pegawai dari Kominfo. Jadi piramidanya sangat jomplang sehingga harus dibutuhkan jumlah pegawai yang besar. Biasanya setiap tahun kami hanya mendapat sekitar mungkin 100 sampai 150 orang, tapi sekarang cukup banyak jadi untuk menggantikan formasi yang akan Pensiun.

Dan Pak Kharis, data per hari ini, Pak, untuk jumlah pelamar adalah 14.712 orang, Pak, yang tadi 3.500 orang itu per 27 Agustus ya, kalau sekarang sudah 14.712 orang jadi cukup meningkat ya.

Untuk Pak Rizki, jadi memang dari anggaran yang kita ajukan inisiatif 35 miliar untuk pengembangan TVRI stasiun penyiaran TVRI yang baru termasuk di Banten ada, Pak, juga ada. Jadi untuk penambahan beberapa peralatan di studio, kamera, dan kami juga akan merencanakan untuk menambah News Van buat di TVRI Banten. Jadi mudah-mudahan ini disetujui jadi kita bisa menambahkan untuk kemampuan TVRI Banten bisa lebih maksimal *gitu* ya. Kami juga masih berharap sebenarnya dari TVRI Banten, mungkin Pak Rizki bisa bantu adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten untuk hibah tanah di beberapa daerah di Selatan, Pak, karena *coverage*-nya masih sangat rendah sekali, kita harus bangun pemancar di situ dan dibutuhkan tanah yang berarti ada hibah dari Kabupaten kepada kita nanti biar kita proses. Mungkin ke depan bisa dibantu untuk komunikasi dengan Bupati *gitu* ya, Pak, ya.

Pak Slamet, untuk keseimbangan siaran, Pak, saat ini di TVRI memang berita sebesar 50%, Pak, kemudian hiburan 20%, dan pendidikan 30% itu presentasinya. Jadi memang saat ini berita lebih banyak ya dan ini termasuk berita-berita politik juga. Dan tentu saja kami tetap mengedepankan informasi-informasi yang sehat dan tidak membuat kegaduhan sebenarnya.

Jadi itu termaktub dalam PP kami bahwa kami harus memberikan informasi yang sehat dan mencerdaskan *gitu*, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan ini tetap menjadi kiprah TVRI untuk menjaga keseimbangan ini, Pak.

Terima kasih, demikian, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

RRI, silakan.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, sebelum ke RRI ada yang belum dijawab, Pak Dirut TVRI, pertanyaan saya tentang kesiapan infrastruktur teknik Pilkada 2024. Itu masuk dalam anggaran tambahan ya, Pak, ini ada.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Betul, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Betul.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Jadi ada misalnya untuk pembangunan 5 pemancar di luar proyek hibahnya dari Kominfo, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Eenggak, kalau Pilkada ini anggarannya keluar tahun berapa, Pak, kapan kira-kira anggaran ini pengajuan ini, kan tahun depan kan.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Tahun depan, Pak, ya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pilkada kan tahun ini.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Yang Pilkada ini, Pak, itu sudah, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ini ada kesiapan di halaman berapa ini *enggak* tahu, *enggak* ada halamannya.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Terakhir, Pak, ya, halaman terakhir yang Pilkada, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Iya, pilkada, kesiapan infrastruktur teknik Pilkada 2024.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Jadi untuk Pilkada 2024 kami sudah mendapatkan rilis *automatic adjustment* dari pemerintah, Pak. Di sini di halaman terakhir, Pak, ya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Jadi ini bukan bagian dari yang diajukan 800 miliar.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Bukan, bukan, Pak, bukan, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Karena ini terusnya saya lihat ini, Pak, jadi *enggak* ada pembatasannya *gitu loh* karena halaman juga *enggak* ada halamannya ini.

Terima kasih, Pak Dirut,

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Ada rupiahnya juga *kok*, Pak.

F-PG (NURUL ARIFIN, M.SI.):

Mas Sturman, izin, mestinya ditanyakan duitnya terus buat apa yang sudah di, bintangnya dicopot itu.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Iya, lanjut.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Baik, terima kasih, Ketua.

Pertama, saya mau menjawab pertanyaan Pak Sturman, terima kasih *concern*-nya untuk supaya siaran kita bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia secara optimal. Pak Sturman, kami punya 133 stasiun di seluruh Indonesia dan kami sejauh ini cakupan kami sudah mencapai 92% dari populasi, 92, 92%. Dan usulan tambahan yang kami ajukan di sini kebanyakan dari upaya-upaya kita untuk meningkatkan kualitas jangkauan siaran, ini kebanyakan infrastruktur siaran, Pak, ya ini dari 12 *item* yang kami ajukan. Jadi semoga ini seperti contoh untuk peningkatan pengadaan siaran transmitter SW supaya bisa ditempatkan di daerah terluar ya, juga sewa pemancar SW ya, diantaranya itu untuk kebutuhan yang di maksud Pak Sturman.

Terima kasih.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, pendalaman.

8% itu wilayah mana, Pak, yang belum.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

92%.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Iya, yang belum 8% kan?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Yang belum itu kebanyakan di daerah-daerah kita secara detail nanti.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Danau Toba, Pak, bukan?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Kenapa?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Danau Toba, bukan?

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Danau Toba sudah, sudah ada pemancar di sana.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Enggak, soalnya ada Pak Coki di sini, Pak, marah dia sama saya nanti. Mana, Pak, wilayah Papua

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Di sebagian Papua ya jadi menyebar, Pak Sturman, tapi kita *enggak* bawa datanya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Mungkin kalau boleh, Pak, nanti datanya kami minta, Pak, setelah ini.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Baik.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Terima kasih, Pak Sturman.

Karena ini ada kaitannya dengan Pak Andika, jadi pengadaan yang kita lakukan ini punya orientasi untuk meningkatkan peningkatan kualitas *Coverage* ya, terima kasih,

Kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu Nurul, pertama terkait dengan pertanyaan pendalaman terkait gedung penunjang siaran luar negeri. Jadi yang kami ajukan adalah sebesar 97,5 miliar, Bu Nurul, 57,5 dari kebutuhannya sesungguhnya kebutuhannya adalah 64 miliar ya. Dari 84 miliar itu kita sisakan dari pagu anggaran ya sebesar 26 miliar dan sisanya ini yang kita ajukan di Pagu Anggaran 2025 ini, jadi nilai yang kita ajukan 57,5. *Nah*, sejauh ini kita memang belum bisa menggunakan, belum selesai dari Tahun 2021 yang seharusnya sudah selesai, demikian.

Kemudian terkait dengan gedung, Pembangunan gedung pasca gempa di RRI Jayapura. Jadi gempa itu terjadi pada 9 Februari 2023 ya, besarnya 5,4 *Megahertz* dan terjadi di kedalaman 10 kilo dari Irian Jaya, Jayapura. *Nah*, kami juga sudah mendapatkan analisis teknis yang dari Dinas PUPR yang kemudian menyatakan bahwa gedung perkantoran itu dikategorikan rusak berat, sehingga memang harus dibangun Kembali. Itu yang bisa kami klarifikasi terkait usulan kami, Bu Nurul. 25 ini bangunan saja,

nah kebetulan yang rusak itu memang bangunannya kalau alat-alatnya di dalam *enggak*, *enggak* rusak. Jadi bangunannya retak-retak, Ibu Nurul. *Nah*, ini ada kajian teknis dari Dinas PUPR Pemerintah Kota Jayapura yang sudah mengklarifikasi ada lampiran kajian teknisnya, Ibu, ya dikategorikan rusak berat seperti itu, Bu Nurul.

Baik, kemudian terkait dengan pengadaan pemancar, saya nanti akan minta bantuan Pak Sujai Direktur dari kami untuk ada data di mana saja pemancar itu dibutuhkan. Saya minta tolong, Pak Sujai.

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Baik, Pak, terima kasih.

Untuk yang rencana Pembangunan 17 lokasi untuk pemancar tahun ini, itu yang pertama ada di Banyuasin-Sumatera Selatan, kemudian Ogan Komering Ilir, Polewali Mandar-Sulawesi Barat.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pak, kalau ada *slide*-nya supaya kita bisa ngelihat sekalian, kalau ada.

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Belum ada *slide*-nya, nanti kita dikirim, Pak, mungkin, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oke.

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Saya bacakan dulu kemudian setelah Polewali Mandar, ada Ogan Komering Ulu Selatan-Sumatera Selatan, Malinau, Kalimantan Utara, Puncak Jaya-Papua, Dogiyai-Papua Barat atau Tengah sekarang, Puncak Nabire-Papua Tengah, Mappi-Papua Selatan, Sula-Maluku Utara, Deiyai-Papua Tengah, Halmahera Timur, Sumba Tengah, Buru Selatan, Ambon, Pakpak Bharat-Sumatera Utara, Mamberamo Tengah-Papua Pegunungan, dan juga Tamberau-Papua Barat. Jadi memang tahun ini kita lebih banyak di Papua untuk yang pemancar baru, total ada 17.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, itu makanya saya tanya tadi kalau ada *slide*-nya, kan setiap pembangunan itu kan beda-beda kebutuhan anggarannya iya kan, Pak. Misalnya Puncak Jaya berapa yang dibutuhkan tentulah berbeda dengan di Halmahera. Saya tadi pengen lihat sehingga *totally*-nya berapa tadi itu *loh*, Pak. Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Atau Pak Sturman mau tanya daerah mana saja.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Tadi kan sudah disampaikan, Pimpinan, saya *enggak* mau cari-cari. *Gini*, tadi kan Pak, *sinten asmane nggih?* Pak, siapa?

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Sujai, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Hah?

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Sujai.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pak Sujai tadi menyampaikan atas perintah dari Pak Dirut menyampaikan daerah-daerah yang mau dibangun kan itu. *Nah*, itu kan saya mau lihat kalau diucapkan kita kan *enggak*, *enggak* apa, *enggak* ingat kita, Pak.

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Iya, iya.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Artinya, kalau ada *slide* di situ kemudian termasuk anggaran atau dananya masing-masing stasiun mau dibangun *gitu loh*, Pak, sehingga kita bisa lihat. Makanya saya tadi mana daerah yang belum 8% ini kata Pak Dirut tadi yang belum terbangun *gitu loh*, sehingga kita *oh* nanti tahun depan kita ajukan lagi misalnya demikian.

Terima kasih, Pimpinan.

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Sebentar mau ditayangkan, Pak.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Baik, saya akan melanjutkan.

Terima kasih catatan dari Pak Nico terkait kecermatan kita untuk dalam melakukan migrasi dari analog ke digital. Terkait dengan migrasi ini sebetulnya kami akan mengikuti undang-undang, arahan undang-undang yang memang dikatakan akan dilakukan secara alamiah dan kami akan mengikuti aturan itu, demikian juga aturan dari Kominfo selaku regulator. Tapi intinya kita melakukan berdasarkan peraturan yang ada begitu. Terima kasih *concern*-nya, Pak Nico.

Selanjutnya dari Pak Rizki, apakah pengadaan yang diajukan itu akan membantu peningkatan kualitas siaran. Tentu saja iya, kita akan juga alokasikan untuk siaran di RRI Banten untuk Pak Rizki.

Kemudian untuk Pak Slamet, bagaimana untuk menjaga keseimbangan Pendidikan, politik, dan agama. Tentu saja kami kerja sama dengan Lembaga-lembaga yang terkait ya dengan Kemenag ya untuk urusan agama, juga pendidikan politik kita kerja sama dengan KPU, Bawaslu. Jadi hal ini untuk memastikan bahwa kita tidak apa ya *sinkron* dengan apa yang seharusnya. Demikian, Pak Slamet.

Pak Sujai, sudah ada? *Oh*, ya oke. Ini, Pak Sturman.

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Secara umum memang ini kita dibagi sama rata tetapi ujung-ujungnya kita subsidi silang, Pak, karena biaya pengiriman ke daerah-daerah pedalaman seperti Puncak Jaya, Dogiyai, dan sebagainya tentu lebih tinggi dibanding dengan kita kirim ke Sumatera *gitu*. Jadi memang inii secara *everage* kita seperti ini dan ini tidak hanya pemancar, termasuk penarikan listrik baru, kemudian kita ada AC, dan lain sebagainya, termasuk UPS, dan lain sebagainya. Jadi memang anggarannya seperti ini kira-kira, *gitu*, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan, jadi ini bukan bangunan ya, Pak, peralatan ya, mesin ya.

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Iya, pemancar dan pendukung, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oke, terima kasih.

DIREKTUR UTAMA LPP RRI (HENDRASMO):

Cukup, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Cukup, oke.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Sebenarnya cukup, Pak, cuma di Sumatera kayak *enggak* ada itu barang itu katanya, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Berarti sudah ter-cover, Pak.

DIREKTUR TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU LPP RRI (MUHAMAD SUJAI):

Sumatera sudah banyak, Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Dari Halmahera bisa ke Sumatera maksudnya.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Tadi ini kan yang 8% tadi, Pak.

Pak Dirut TVRI tadi disampaikan bahwa akan ada kebutuhan tambahan listrik untuk pemancar yang akan dihibahkan oleh Kominfo. Itu apakah hibah yang berkaitan dengan DBS atau bukan.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Betul, Pak, hibah yang berkaitan dengan DBS, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Betul ya, oke.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Direncanakan mulai kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan *schedule* itu mulai tahun depan sudah mulai berjalan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Tahun depan ya.

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (IMAN BROTOSENO):

Iya.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Oke, jadi buat teman-teman kan ini nanti akan DBS dari Kominfo mereka tinggal terima, maka mereka harus nyiapin listriknya itu, oke ya. Dari Dewas TVRI ada tambahan? Cukup. Dewas RRI? Silakan, Pak.

DEWAN PENGAWAS LPP RRI:

Izin, Bapak Pimpinan, keluar dari topik RKA kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan informasi bahwa Dewas LPP RRI bersama dengan direksi, pada tanggal 30 Agustus yang lalu sudah berhasil merampungkan Perdewas dengan Nomor 03/2024. Mungkin ini merupakan turunan dari PP yang kebetulan nomornya sama. Mudah-mudahan bukan cuma suatu kebetulan saja.

Dalam kesempatan ini kami ingin menggunakan waktu ini untuk menyampaikan secara resmi peraturan Dewas tadi yang sekaligus sudah dilakukan pembahasannya sejak bulan Juli 2024 dan *Alhamdulillah* selesai dalam waktu 2 bulan. Dengan membuka ruang dialog yang selebar-lebarnya antara Dewas dan Direksi.

Mohon berkenan untuk penyampaian ini.

**KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Silakan, Pak, dibawa ke depan, Pak.

DEWAN PENGAWAS LPP RRI:

Teman-teman Dewas silakan.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI/WAKIL KETUA/F-
PKS):**

Sudah Bapak saja, satu saja sendiri.

(PENYERAHAN PERATURAN DEWAS LPP RRI)

Baik, terima kasih Pak Ketua Dewas TVRI sudah, sudah? Jadi kita lebih suka begini, soal diskusi dan apa pembahasannya silakan dibahas, selesai, *rampung*, hasilnya diserahkan kepada kita, kita terima kasih. Terima kasih sekali lagi Ketua Dewas dan seluruh Anggota Dewas, kita tidak ingin tahu diskusinya lah yang penting selesai baik-baik, tinggal berjalan bersama ke depan.

Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya kira cukup pembahasan, kita masuk pada Kesimpulan.

Kesimpulan Rapat Dengan Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut dan Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, dan LPP RRI, serta Sesjen Wantannas, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2024-2025, Rabu, 4 September 2024.

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewas dan Dirut LPP TVRI, dan LPP RRI, serta Sesjen Wantannas tentang pagu anggaran Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor S-162/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/04/2024, tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:
 - a. Pagu anggaran LPP TVRI Tahun Ajaran 2025 sebesar Rp1.422.203.659.000,- dengan rincian berdasarkan program, sebagai berikut:
 - 1) Program dukungan manajemen sebesar Rp932.019.189.000,- dan
 - 2) Program penyiaran publik sebesar Rp490.184.470.000,-
 - b. Pagu anggaran LPP RRI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.070.311.831.000,- dengan rincian berdasarkan program, sebagai berikut:
 - 1) Program dukungan manajemen sebesar Rp949.645.314.000,- dan
 - 2) Program penyiaran publik sebesar Rp120.166.517.000,-
 - c. Pagu anggaran Wantannas Tahun Anggaran 2025, ulang ya tahun anggaran 2025 sebesar Rp54.665.836.000,- dengan rincian berdasarkan program, sebagai berikut:
 - 1) Program kebijakan dan strategi ketahanan nasional sebesar Rp10.044.746.000,-
 - 2) Program dukungan manajemen sebesar Rp44.621.000.000,-

2. Komisi I DPR RI juga telah mendengarkan usulan tambahan anggaran LPP TVRI, dan LPP RRI, serta Wantannas sebagai berikut:
 - a. LPP TVRI mengusulkan tambahan anggaran yang tidak terakomodir dalam anggaran pagu anggaran LPP TVRI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp825.923.371.000,- yang dialokasikan untuk:
 - 1) Kebutuhan biaya operasional satker baru sebesar Rp35 miliar;
 - 2) Kebutuhan pembangunan gedung kantor, tower pemancar, studio, dan prasarana TVRI tahap I di Ibu Kota Nusantara atau IKN tahap I sebesar Rp77 miliar;
 - 3) Kebutuhan pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN serta belanja pegawai sebesar Rp350.098.140.000,-
 - 4) Kebutuhan tambahan biaya listrik dukungan program DBS sebesar Rp12.672.000.000,-
 - 5) Kebutuhan pelaksanaan produksi siaran sebesar Rp140 miliar;
 - 6) Kebutuhan pengadaan pendukung infrastruktur penyiaran sebesar Rp182.953.231.000,-
 - 7) Kebutuhan pengadaan prasarana umum sebesar Rp26.200.000.000,-
 - 8) Kebutuhan sosialisasi Lembaga Penyiaran publik kepada masyarakat sebesar Rp2 miliar.
 - b. LPP RRI menyampaikan pengajuan usulan tambahan anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp418.503.829.400,- yang dialokasikan untuk:
 - 1) Penyelesaian pembannan gedung dan pengadaan *furniture* penunjang SLN sebesar Rp57.584.037.000,-
 - 2) Pembangunan gedung paska gempa RRI Jayapura sebesar Rp14 miliar;
 - 3) Pengadaan pemancar FM 3 kilowatt dan kelengkapan di 4 lokasi sebesar Rp6.204.640.000,-
 - 4) Pengadaan mixer digital untuk 30 satuan kerja sebesar Rp6 miliar;
 - 5) Pengadaan pemancar FM DRM serta peralatan pendukung untuk 13 lokasi sebesar Rp31.826.912.000,-
 - 6) Pengadaan pemancar FM DAB 5 kilowatt dan kelengkapannya untuk 4 satuan kerja sebesar Rp14.582.926.400,-
 - 7) Pengadaan pemancar SW *support* DRM 50 kilowatt dan kelengkapannya atau SLN sebesar Rp30 miliar;
 - 8) Sewa pemancar SW di luar negeri sebesar Rp4 miliar;
 - 9) Digitalisasi stasiun penyiaran untuk 17 Korwil LPP RRI, peralatan studio, dan MCR sebesar Rp127.500.000.000,-
 - 10) Pengadaan *remote monitoring* pemancar radio sebesar Rp23.991.984.000,-
 - 11) Pengadaan wincam studio sebesar Rp46.444.200.000,-
 - 12) Pengadaan transmitter SW 100 kilowatt sebesar Rp56.369.130.000,-

- c. Wantannas menyampaikan pengajuan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.430.230.000,-

Selanjutnya Komisi I DP RI akan meneruskan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Wantannas ada yang mau dikoreksi? Cukup, dari TVRI ada yang koreksi? Cukup, RRI cukup? Oke.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita ketok kesimpulan rapat ini.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu sekalian, demikian rapat kita hari ini untuk pembahasan pagu sementara. Selanjutnya akan nanti kita laporkan ke Badan Anggaran, sehingga nanti akan menjadi paku anggaran. Mudah-mudahan pada pekan tanggal 9, 10, 11, eh 10, 11, 12 kita akan membahas tentang pagu anggaran 2025 dan sekaligus apa pengambilan Keputusan ya, penetapan.

Untuk itu saya kira kita ucapkan terima kasih kepada Sesjen Wantannas, Dewas LPP TVRI, Dirut TVRI, Dirut RRI, Dewas RRI, dan seluruh jajarannya, Pimpinan dan Anggota Komisi I semua, terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian rapat segera kita tutup.

*Wabillahittaufiq Wal Hidayah,
WAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.01 WIB)

**Jakarta, 4 September 2024
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sartomo, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001**